

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era ini, sebuah pemerintahan dituntut untuk melakukan suatu kinerja dengan pendekatan *good governance*. Semua aspek pemerintahan dalam suatu organisasi harus dapat memberikan manfaat untuk negara. Selain itu ketersediaan informasi pemerintahan yang lengkap dan akurat turut mendukung kelancaran dalam tujuan *good governance*. Informasi dalam konteks ini berkaitan dengan posisi laporan keuangan entitas dan tingkat kesehatan yang tercantum dalam laporan keuangan harus mengandung unsur-unsur *relevance* dan *reliable*. Maka dari itu, manajemen suatu organisasi selaku pengelola keuangan entitas diharuskan dan dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan agar tidak menyesatkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik dalam lingkup organisasi pemerintah tersebut maupun oleh *stakeholder*.

Dalam sebuah laporan keuangan suatu entitas, pertanggungjawaban dari manajemen belum dapat menyatakan bahwa laporan tersebut sudah bebas dari salah saji material dan indikasi kecurangan. Sehingga diperlukan keterlibatan jasa profesional yang dapat dipercaya dan tidak memihak guna menjamin kewajaran sebuah laporan keuangan. Guna meningkatkan kualitas suatu informasi maka diperlukan sebuah jasa profesional yang disebut dengan *assurance service*. Orang yang dapat melakukan kegiatan jasa tersebut adalah akuntan publik atau auditor.

Pada dasarnya fungsi dari auditor adalah untuk menilai kewajaran dari suatu laporan keuangan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dalam *internal control*, dan pendeteksian apabila terjadi *fraud* dalam kegiatan baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Dalam proses audit, auditor dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar audit dan menjunjung tinggi nilai independensi dan obyektivitas. Auditor juga diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan mutu manajemen serta kualitas informasi. Namun pada kenyataannya, auditor sering mengalami beberapa hambatan yang dapat mengganggu serta menurunkan tingkat independensinya baik yang muncul dari dalam diri auditor itu sendiri maupun dari pihak luar.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Fenomena penurunan tingkat independensi auditor dapat disebabkan oleh *management pressure*, *audit time budgeting* dan *audit tenure*. *Management pressure* atau tekanan manajemen merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu independensi auditor. Dalam membuat laporan keuangan manajemen cenderung menyajikan suatu laporan keuangan yang sebaik mungkin guna memberikan informasi yang baik kepada pengguna laporan keuangan tanpa menjunjung tingkat kebenaran informasi tersebut. Guna mencapai keberhasilan kecurangan tersebut, pada umumnya manajemen akan mempengaruhi auditor selama proses audit. Pengaruh yang bersifat intervensi pada umumnya muncul ketika terjadi perbedaan pendapat antara auditor dengan pihak manajemen. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa manajemen yang meminta auditor untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar dan pemberian opini. Terjadi berbagai macam intervensi baik dilakukan dengan memberikan uang, tindakan pemutusan hubungan dalam hal ini mengancam auditor untuk tidak akan memakai jasa nya kembali suatu saat nanti, serta tindakan mengancam baik kekerasan maupun psikis dan tindakan lainnya.

Salah satu contoh ketidak independensian auditor di dalam pemerintahan adalah adanya kasus penangkapan dua auditor Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas kasus penyuapan yang dilakukan oleh oknum pemerintah kota Bekasi untuk melakukan manipulasi hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah kota Bekasi ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2010). Pada sektor swasta juga pernah terjadi kasus skandal besar yang melibatkan Enron, yang merupakan perusahaan

energi terbesar di Amerika Serikat dengan KAP Arthur Andersen. Pada kasus yang menghebohkan ini telah terjadi suatu pemanipulasian laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian (Arens et al, 2008). Dua kasus yang terjadi tersebut baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri telah melibatkan auditor, dimana auditor sebagai pihak independen telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya suatu bentuk manipulasi hasil audit.

Pada umumnya tujuan manajemen melakukan *management pressure* terhadap auditor agar membuat opini sesuai dengan yang diinginkan adalah untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, dimana laporan keuangan tersebut sudah dibuat oleh manajemen tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan para *stakeholder* pengguna laporan keuangan. Di dalam pemerintahan sendiri terdapat kantor yang melakukan *management pressure* kepada auditor baik internal maupun eksternal. Tujuan kantor tersebut adalah agar auditor tidak memunculkan masalah dalam laporannya apabila suatu kantor terdapat manajemen yang salah dalam menggunakan uang anggarannya tidak sesuai penggunaannya atau menyalahi aturan. Selain itu untuk menyembunyikan tindakan yang melawan hukum seperti korupsi.

Pada umumnya, auditor diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi yang terjadi. Teori pengharapan menyatakan bahwa motivasi tergantung pada dua hal, yaitu seberapa kuat kita menginginkan sesuatu dan seberapa besar kita mendapatkan sesuatu (Griffin, 2002). Pada teori ini dikatakan bahwa saat auditor

dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka auditor cenderung untuk melakukan perilaku yang diinginkannya meskipun bertentangan dengan prosedur audit (Suprianto, 2009). Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap independensi yang dimiliki oleh auditor. *Audit time budgeting* akan membuat auditor memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas audit dengan tepat waktu. Hal ini dapat berdampak untuk mengabaikan independensi yang dimiliki oleh auditor agar tugas audit yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu. Apabila *audit time budgeting* tinggi, independensi yang dimiliki oleh auditor akan dapat tetap terjaga dengan baik karena tidak adanya tekanan dari anggaran waktu yang telah ditetapkan yang dapat mengganggu independensi auditor. Sebaliknya, dengan *audit time budgeting* yang rendah, independensi yang dimiliki oleh auditor akan terganggu.

*Audit Tenure* atau lama hubungan audit terhadap klien juga dapat mempengaruhi independensi auditor. Semakin eratnya jalinan hubungan antara auditor dengan klien sering kali mengakibatkan sulitnya untuk menegakkan independensi. Secara manusiawi, auditor yang sudah saling mengenal dengan klien akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan klien. Kondisi yang menyudutkan auditor inilah yang kemudian menimbulkan kemungkinan hilangnya independensi auditor sehingga auditor akan menuruti keinginan manajemen.

Terdapat penelitian sebelumnya yang berupaya meneliti pengaruh *management pressure* dan *audit time budgeting* terhadap independensi auditor.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh intervensi manajemen, pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor, *tight audit time budget* terhadap independensi auditor terhadap independensi auditor. Penelitian tersebut memberikan hasil yang diharapkan bahwa *management pressure* dan *audit time budgeting* berpengaruh terhadap independensi auditor. Penelitian ini perlu dilakukan karena bukti secara empiris masih sangat terbatas dalam konteks di Indonesia. Selain itu usaha peningkatan independensi auditor yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait perlu didukung dalam bentuk penelitian akademis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heni Meilisa, (2013) menunjukkan bahwa pengujian variabel intervensi manajemen terhadap independensi auditor mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka H1 diterima. Intervensi manajemen bertolak belakang terhadap tingkat independensi, semakin tinggi tingkat intervensi maka independensi auditor akan terganggu. Selain itu Pengujian variabel *Tight Audit Time Budget* terhadap independensi auditor mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka H3 ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh yang negatif bagi para auditor dilihat dari nilai koefisien determinasi yaitu sebesar  $-0,124$ . Hanya saja *time pressure* tidak signifikan secara statistik terhadap independensi. Artinya tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh secara statistik terhadap independensi auditor.

Penelitian tersebut menguji pengaruh *management pressure* dan *audit time budgeting* pada independensi auditor di Kantor Akuntan Publik di

Sumatera bagian selatan. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti akan menambah satu variabel yaitu lamanya hubungan audit dengan klien, selain itu peneliti akan melakukan studi empiris pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *MANAGEMENT PRESSURE*, *AUDIT TIME BUDGETING*, DAN *AUDIT TENURE* TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR (Studi Kasus di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh).”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *management pressure* berpengaruh terhadap independensi auditor di BPKP Aceh?
2. Apakah *audit time budgeting* berpengaruh terhadap independensi auditor di BPKP Aceh?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap independensi auditor di BPKP Aceh?
4. Apakah *management pressure*, *audit time budgeting*, dan *audit tenure* secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi auditor di BPKP Aceh?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *management pressure* terhadap independensi auditor di BPKP Aceh.
2. Menganalisis pengaruh *audit time budgeting* terhadap independensi auditor di BPKP Aceh.
3. Menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor di BPKP Aceh.
4. Menganalisis pengaruh *management pressure, audit time budgeting, dan audit tenure* secara bersama-sama terhadap independensi auditor di BPKP Aceh.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada auditor untuk mengetahui apakah *management pressure, audit time budgeting dan audit tenur* berpengaruh terhadap independensi. Dengan mengetahui pengaruhnya, auditor dapat melakukan analisa untuk mempersiapkan perencanaan audit guna mengurangi risiko audit yang ditimbulkan.

## 2. Bagi BPKP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPKP untuk membuat suatu sistem pengendalian terhadap risiko audit yang ditimbulkan oleh *management pressure*, *audit time budgeting*, dan *audit tenure*. Dengan dibuatnya sistem pengendalian yang dapat meminimalisir risiko yang timbul, diharapkan auditor BPKP dapat selalu menjaga independensinya.

### 1. 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar atau pokok-pokok penulisan laporan penelitian secara menyeluruh.

Bab II Landasan Teori, berisi acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain itu pada bab ini juga disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, perumusan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari teknik-teknik analisis yang digunakan, variabel penelitian, sumber data, serta populasi dan sampel penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi uraian deksripsi objek penelitian yaitu gambaran umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, analisis kuantitatif kuesioner dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta interpretasi hasil dengan argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian. Bab V Penutup, berisi simpulan yang berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan menjelaskan keterbatasan yang dialami selama penelitian berlangsung. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, peneliti mencoba memberikan saran perbaikan yang dipandang perlu bagi auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, serta penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

